



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LAPORAN Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026



NIP. 19731022 200501 1 007

## Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur”:
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase ketersediaan infrastruktur, Formulasi Perhitungan :
$$\begin{aligned} & ((\text{Persentase kemandapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga} \\ & \text{yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase} \\ & \text{rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan} \\ & \text{perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + \\ & (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + \\ & (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + \\ & (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi}/14) \\ & + (\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}/14) + (\text{Rasio} \\ & \text{Jaringan Irigasi}/14) + (\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa} \\ & \text{Konstruksi}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang terlayani} \\ & \text{pengelolaan sampah}/14)). \end{aligned}$$


- Capaian indikator (a.) Persentase ketersediaan infrastruktur dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 10 (sembilan) Program, yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Perumahan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penataan Bangunan Gedung.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 29.41 %; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 29.47 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 100 %.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 29.38 % terjadi peningkatan sebesar 9 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang”:
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Formulasi Perhitungan :  
$$(IP + \text{Hasil pengawasan Teknis}) / 2.$$
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0.7%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 0.7 Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 100 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 0.65% terjadi peningkatan sebesar 0.05 %..


Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi DPUPRRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, masih adanya kesenjangan ketersediaan layanan dasar antarwilayah terutama di kawasan perdesaan dan pesisir.
2. Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan perlindungan pantai akibat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta perlunya peningkatan kualitas pemeliharaan infrastruktur agar tingkat kemantapan jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan dapat terjaga secara berkelanjutan.
3. Konsistensi implementasi rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang di lapangan.
4. Masih adanya potensi konflik dan sengketa pertanahan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlunya percepatan penyusunan dan digitalisasi dokumen RDTR yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya



manusia dan pemanfaatan teknologi informasi geospasial guna mendukung pengawasan dan pengendalian tata ruang yang lebih efektif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	11
1.3 Isu-isu Strategis .....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025 .....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30

BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

13

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

14

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

15

Tabel II.1 Sasaran Strategis DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

17

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

17

Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

18

Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

18

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala DPUPRPRKPTahun 2025

19

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

.....  
21

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

22

Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1

24

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja

25

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

27

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja .....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur DPUPRRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada DPUPRRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar II.1. Website DPUPRRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website DPUPRRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10

### **Bab I berisi :**

1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

# BAB I

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau 5APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## 1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscutingkaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja ... (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

“Pohon Kinerja”



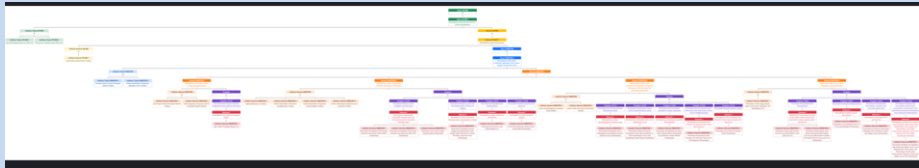
<https://drive.google.com/file/d/19hNWxB4wnMzr61Lo>  
MSI07\_PBNK\_Dai\_View2user-drive-link

## **1.2 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

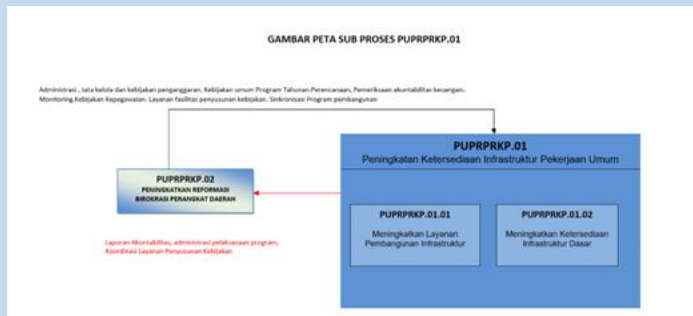
Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

### “CASCADING”



Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link :  
[https://drive.google.com/file/d/1tWJY47DfjH9toxK6VwQmdni87FNz13Ua/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1tWJY47DfjH9toxK6VwQmdni87FNz13Ua/view?usp=drive_link)

### “PETA PROSES BISNIS”



Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1lse\\_1VsLDdUto9\\_9xEzYx1UQHvGlV](https://drive.google.com/drive/folders/1lse_1VsLDdUto9_9xEzYx1UQHvGlV)

### “STRUKTUR ORGANISASI”



Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :  
[https://drive.google.com/file/d/1CH4Y0V36oW48zbToPcjWfnC5\\_nKF65xs/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CH4Y0V36oW48zbToPcjWfnC5_nKF65xs/view?usp=drive_link)

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

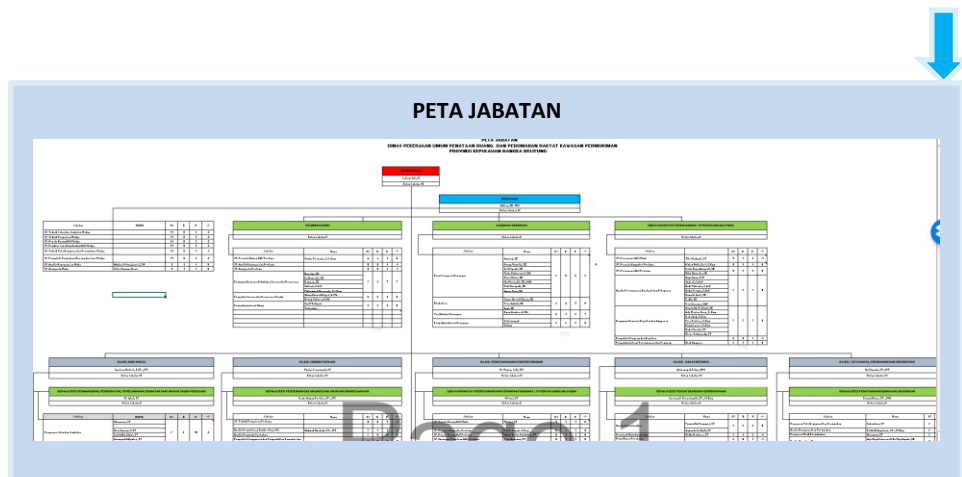
Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.  
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada DPUPRPRKP  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas PUPRPRKP;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD.





#### 1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampumenangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum”, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas dan Ketangguhan Logistik:  
Sebagai provinsi kepulauan, hambatan geografis memicu tingginya biaya logistik. Diperlukan integrasi infrastruktur jalan menuju simpul transportasi (pelabuhan dan bandara) untuk mendukung distribusi komoditas unggulan.
2. Masih adanya gap antara pertumbuhan penduduk

dengan akses air minum layak, sanitasi, dan hunian yang terjangkau di kawasan permukiman kumuh.

3. Peningkatan Kualitas Pengendalian Tata Ruang: Tantangan dalam menjaga konsistensi pemanfaatan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan yang masif di lapangan.
4. Peningkatan efisiensi fungsi irigasi dan pembangunan embung guna mendukung produktivitas lahan pertanian lokal sebagai alternatif pasca-tambang

#### **1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>												
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
3	kabid Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
4	Kabid Jasa Konstruksi	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
5	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
6	Kabid Sumber Daya Air	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
7	Kabid Bina Marga	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
8	Kepala UPT Pengawasan dan Peralatan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
10	Kasi Pertanahan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kasubag Umum	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
12	Kasi Pengendalian Tata Ruang	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
13	Kasi Pengembangan Air	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-

	Baku dan Jaringan SDA												
14	Kasi Pengawasan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
15	Kasubag Tata Usaha UPT Pengawasan dan Peralatan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
16	Kasi Peralatan Alat Berat	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
17	Kasi Pemb. Peningkt. Pemel. Jembt dan Lab. Pengujian	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
18	Kasubag Keuangan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
19	Kasi Pengaturan dan Pemberdayaan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
20	Kasi Pengemb. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
21	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
22	Kasi Sungai dan pantai	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kasi Pengawasan Alat Berat	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>												
1	Perencana Ahli Muda						1	-	1	-	-	-	1
2	Perencana Ahli Pertama						2	-	2	-	-	1	1
3	Teknik Pengairan Ahli Muda						1	1	-	-	-	1	-
4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda						1	1	-	-	-	1	-
5	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda						1	-	1	-	-	-	1
6	Teknik Jalan dan Jembatan						1	-	-	1	-	-	1

	Mahir												
	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana lanjutan					1	-	-	1	-	1	-	
7	Analisis Kepegawaian Ahli Muda					1	-	1	-	-	-	1	
8	Arsiparis Ahli Muda					1	-	1	-	-	-	1	
9	Pranata Komputer Ahli Pertama					2	-	2	-	-	-	2	
10	Pranata Komputer terampil					1	-	-	1	-	1	-	
11	Penata Ruang Ahli Muda					1	-	1	-	-	-	1	
12	Penata Ruang Ahli Pertama					2	-	2	-	-	2	-	
13	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama					1	-	1	-	-	1	-	
14	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama					2	-	2	-	-	2	-	
15	Pranata Humas Ahli Pertama					1	-	1	-	-	1	-	
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>												
1	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan					2	-	2	-	-	1	1	
2	Analisis Pengembangan Infrastruktur					4	1	3	-	-	4	-	
3	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					7	-	7	-	-	-	7	
4	Pengawas Jalan dan Jembatan					17	5	12	-	-	15	2	
5	Penyusun Rencana					5	-	5	-	-	2	3	

	Kebutuhan Sarana dan Prasarana												
6	Penata Penyehatan Lingkungan dan Permukiman					1	-	1	-	-	-	-	1
7	Analisis Perumahan					1	-	1	-	-	1	-	
8	Analisis Infrastruktur					3	1	2	-	-	3	-	
9	Analisis Pertanahan					2	-	2	-	-	1	1	
10	Pengawas Pengoperasian Alat Berat					3	1	2	-	-	3	-	
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan					2	-	2	-	-	-	2	
12	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan					7	-	7	-	-	6	1	
13	Pengawas Irigasi					1	-	1	-	-	1	-	
14	Analisis Bangunan dan Perumahan					3	1	2	-	-	2	1	
15	Penata Laporan keuangan					7	1	6	-	-	2	5	
16	Analisis Pengelolaan SDA					4	1	3	-	-	3	1	
17	Penyuluh dan Fasilitator Hukum Pertanahan					2	-	2	-	-	2	-	
18	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan					3	-	-	3	-	2	1	
19	Pengelola Keuangan					1	-	-	1	-	-	1	
20	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan					1	-	-	1	-	1	-	
21	Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan					5	-	-	5	-	5	-	

22	Pengawas Bangunan dan Gedung					1	-	1	-	-	1	-
23	Analisis Penataan Kawasan					3	1	2	-	-	1	2
24	Analisis Hukum Pertanahan					2	-	2	-	-	2	-
25	Analisis Jalan dan Jembatan					3	1	2	-	-	1	2
26	Pengawas Fisik Permukiman					2	-	2	-	-	2	-
27	Bendahara Dinas					3	-	3	-	-	1	2
28	Teknisi Pengelolaan SDA					7	-	-	-	7	7	-
29	Teknisi Keciptakarya					4	-	-	1	3	4	-
30	Verifikator Keuangan					1	-	-	1	-	1	-
31	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor					3	-	-	3	-	2	1
32	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan					2	-	-	2	-	1	1
33	Pengelola Pemeliharaan jalan					1	-	-	1	-	1	-
34	Penguji Laboratorium Tanah, aspal dan Beton					2	-	2	-	-	2	-
35	Pemeriksa Jalan dan Jembatan					2	-	2	-	-	2	-
36	Penelaah Mutu Konstruksi					1	-	1	-	-	1	-
37	Pengadministrasi Umum					4	-	-	-	4	-	4
38	Pemelihara Peralatan					2	-	-	-	2	2	-
39	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana					3	-	-	-	3	3	-
40	Pengadministrasi Perencanaan dan Program					1	-	-	-	1	-	1

41	Pemelihara Sarana dan Prasarana					3	-	-	-	3	3	-
42	Pengadministrasi Keuangan					2	-	-	-	2	2	-
43	Pemelihara Jalan					4	-	-	-	4	4	-
44	Pengelola Perumahan dan Permukiman					3	-	-	3	-	2	1
46	Pranata Kawasan Konservasi					1	-	-	1	-	1	-
47	Pengadministrasi Kepegawaian					1	-	-	-	1	-	1
<b>D</b>	<b>PPK/PHL</b>											
1	Tenaga Pelayanan Umum					140	-	46	11	83	95	45
2	Pramubakti					8	-	-	-	8	8	-

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 145 orang (44%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 28 orang (8%), D3 sebanyak 36 orang (11%), SLTA sebanyak 121 orang (37%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		<b>229.319.644.760,00</b>
	tanah	132	229.319.644.760,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>		<b>40.189.852.070,32</b>
	alat besar		<b>40.189.852.070,32</b>
	alat angkutan		16.305.734.246,00
	alat bengkel dan alat ukur		6.460.496.250,00
	alat pertanian		2.157.702.553,00
	alat kantor dan rumah tangga		49.500.000,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar		5.557.143.348,92
	alat kedokteran dan kesehatan		248.539.545,00
	alat laboratorium		-
	alat persenjataan		2.539.843.788,00
	komputer		3.450.000,00
	alat eksplorasi		4.201.725.267,40

	alat pengeboran		-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		-
	alat bantu eksplorasi		-
	alat keselamatan kerja		-
	alat peraga		45.050.767,00
	peralatan proses/produksi		-
	rambu – rambu		-
	peralatan olah raga		2.620.666.305,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>		<b>89.968.271.295,98</b>
	bangunan gedung	707	88.752.785.295,98
	monumen	0	240.013.000,00
	bangunan menara	0	-
	tugu titik kontrol/pasti		<b>89.968.271.295,98</b>
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		<b>3.603.445.186.986,98</b>
	jalan dan jembatan	207	3.247.983.639.166,19
	bangunan air	166	325.758.930.477,99
	instalasi	1	2.353.464.532,00
	jaringan	13	27.349.152.810,80
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	-	-
	bahan perpustakaan	-	-
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olaha	-	-
	hewan	-	-
	biota perairan	-	-
	tanaman	-	-
	barang koleksi non budaya	-	-

	aset tetap dalam renovasi	-	-
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>		<b>17.095.670.700,00</b>
	konstruksi dalam pengerjaan	22	17.095.670.700,00
<b>7</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>195.100.000,00</b>
	Aset Tak Berwujud	4	195.100.000,00
	<b>Total</b>		<b>3.980.213.725.813,28</b>

Kendaraan operasional DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 12 unit kendaraan operasional, 6 unit kendaraan roda dua dan 10 truck. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 5 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak tuntutan pekerjaan yang 100 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2026

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	102.530.601.747,00	115.537.342.473,00	-	-	218.067.944.220,00
2025	84.602.772.636,75	52.818.182.953,00			137.420.955.589,75

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan. Total anggaran belanja sebesar Rp 218.067.944.220. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB 2

# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025*
- 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
- 6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

ketersediaan infrastruktur dan Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Menurunkan Disparitas Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat.
2. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun sasaran DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur			18,93	32,39	41,80	54,01	54,01	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang			0.6	0.65	0.7	0.75	0.75	

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Meningkatkan persentase kemantapan jalan	Meningkatkan persentase kemantapan jalan provinsi
		Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi untuk Pengendalian Daya Rusak, Konservasi, dan Pendayagunaan SDA	1. Pengendalian daya rusak air 2. Peningkatan Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pembangunan infrastruktur irigasi
		Pengoptimalan Pengelolaan Penyediaan SPAM	Mengoptimalkan Pengelolaan SPAM
		Pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah	Mengembangkan dan mengelola sistem air limbah
		Pengembangan Perumahan	Mengembangkan Perumahan
		Meningkatkan ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten; Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Melakukan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3K) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	<b>1.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	24,902,923,794	18.881.996.829	6.020.926.965
	1.1.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	8,763,840,600	4.991.364.300	3.772.476.300
	1.1.2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	16,139,083,194	13.890.632.529	2.248.450.665
	<b>1.2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	329,366,700	123.559.600	205.807.100
	1.2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	329,366,700	123.559.600	205.807.100

	<b>1.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	8,053,592,600	7.942.817.160	110.775.440
	1.3.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	8,053,592,600	7.942.817.160	110.775.440
	<b>1.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	65,857,600	23.992.600	41.865.000
	1.4.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	65,857,600	23.992.600	41.865.000
	<b>1.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	110,378,300	568.308.680	457.930.380
	1.5.1 Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	110,378,300	568.308.680	457.930.380
	<b>1.6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	266,993,600	60.637.300	206.356.300
	1.6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	266,993,600	60.637.300	206.356.300
	<b>1.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	54,361,062,371	71.082.699.768,25	16.721.637.397,25

	1.7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	54,361,062,371	71.082.699.768,25	16.721.637.397,25
	<b>1.8 PROGRAM JASA KONSTRUKSI</b>	405,500,000	290.323.650	115.176.350
	1.8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	286,465,250	204.704.900	81.760.350
	1.8.2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	119,034,750	85.618.750	33.416.000
	<b>1.9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	1,721,339,900	352.177.600	1.369.162.300
	1.9.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana RinciTata Ruang Provinsi	167,961,200	47.533.200	120.428.000
	1.9.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	145,981,500	89.071.500	56.910.000,00
	1.9.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang DaerahProvinsi	1,055,990,000	26.750.000	1.029.240.000
	1.9.4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian PemanfaatanRuang Daerah Provinsi	351,407,200	188.822.900	162.584.300
	<b>1.10 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	1,156,968,180	0	1,156,968,180

	1.10.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1,156,968,180	0	1,156,968,180
	<b>1.11 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	4,919,744,234	4.975.665.454	55.921.220
	1.11.1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	308,072,063	326.399.089	18.327.026
	1.11.2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4,611,672,171	4.649.266.365	37.594.194
	<b>1.14 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	67,796,600	36.249.700	31.546.900
	1.14.1 Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	67,796,600	36.249.700	31.546.900
	<b>1.15 PROGRAM PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	478,769,400	33.485.900,00	445.283.500
	1.15.1 Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	478,769,400	33.485.900,00	445.283.500
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>	96,840,293,279	104,371,914,241.25	7,531,620,962

## **2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/058/I/2024.

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

## **2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

### **2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)**

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala DPUPRRKP  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase	%	30.26	Triwulan I	0
		Ketersediaan			Triwulan II	0
		Infrastruktur			Triwulan III	0
					Triwulan IV	30.26
2.	Meningkatnya kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks	%	0.7	Triwulan I	0
		Penyelenggaraan			Triwulan II	0
		Penataan Ruang			Triwulan III	0
					Triwulan IV	0.7

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja  
Kepala DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24.902.923.794,00	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	329.366.700,00	
		Program	65.857.600,00	

		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.053.592.600,00
		Program Pengembangan Permukiman	1.156.968.180,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	110.378.300,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	266.993.600,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	54.361.062.371,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	405.500.000,00
		Program Kawasan Permukiman	4.919.744.234,00
2.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.721.339.900,00
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	67.796.600,00
		Program Penatagunaan Tanah	478.769.400,00
3.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.612.268.042,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR)	869.274.458,00

### 2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tahun 2025, DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 DPUPRPRKP Nomor : BA-3282/DPUPRPRKP/PKP/2025. Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala DPUPRPRKP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio	%	29.41	Triwulan I	0
		Ketersediaan			Triwulan II	0
		Infrastruktur			Triwulan III	0
		Pekerjaan Umum			Triwulan IV	29.41
2.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks	%	0.7	Triwulan I	0
		Perencanaan,			Triwulan II	0
		Pemanfaatan,			Triwulan III	0
		dan Kepatuhan Tata Ruang			Triwulan IV	0.7
3.	Meningkatnya Nilai	Nilai Rapot		Nilai dari		

	Rapot Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah		Inspektorat		
--	-----------------------------------	--------------------------------	--	-------------	--	--

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua  
Kepala DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 24.902.923.794,00	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp329.366.700,00	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp65.857.600,00	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp8.053.592.600,00	
		Program Pengembangan Permukiman	Rp1.156.968.180,00	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp110.378.300,00	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp266.993.600,00	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rp54.361.062.371,00	

		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp405.500.000,00	
		Program Kawasan Permukiman	Rp 4.919.744.234,00	
2	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.721.339.900,00	
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp67.796.600,00	
		Program Penatagunaan Tanah	Rp478.769.400,00	
3.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas PUPRRKP)	Rp34.612.268.042,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR)	Rp869.274.458,00	

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran bertambah 3.92 % sehubungan adanya intruksi Bappeda terkait PHTC.

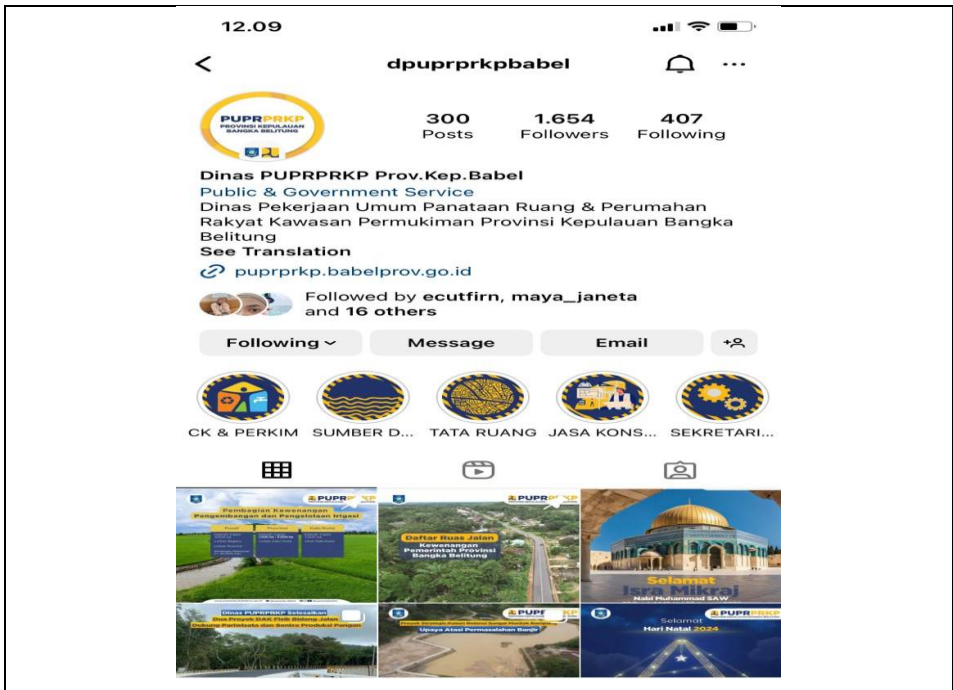
## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://puprprkp.babelprov.go.id/> . Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi DPUPRRKP Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan DPUPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di instagram <https://www.instagram.com/dpuprprkpbabel?igsh=MWVsdWthZ2VreG1nYQ==> . Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di DPUPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Lapor.id.

**Gambar II.2. Website DPUPRKP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**





# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025  
 (tabel ini dapat di buat landscape)  
 (diisi dengan semua sasaran dan indikator sasaran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	<p><u>Indikator:</u> Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u>                      ((Persentase kemantapan jalan/14) + (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak/14) + (Persentase rumah tangga yang besanitasi/14) + (Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi/14) + (Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani/14) + (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh</p>	%	-	29.25	29.41	29.47	100%		54.01

		PSU/14) + (Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara/14) + (Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14)								
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indikator : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Formula Perhitungan: $IK = [ \{ (A/B) + (C/D) \} / 2 + E/2 ]$ A : Struktur Ruang	%	-	0.65	0.7	0.7	100		0.8

		Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang E: Hasil penagwasan								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur

Kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indikator: Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$((\text{Persentase kemandapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + (\text{Persentase$

			<p>Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14)</p>
--	--	--	---

Kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan ((Persentase kemantapan jalan/14) + (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak/14) + (Persentase rumah tangga yang besanitasi/14) + (Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi/14) + (Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani/14) + (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU/14) + (Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara/14) + (Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 29.47% atau sebesar 100% dari target 29.41%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja DPUPRPRKP pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	29.80	29.25	98.15	29.41	29.47	100	54.01	54.56

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 29.47 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (kolom 8) (terlampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 29.25% indikator sasaran Persentase Ketersediaan Infrastruktur mengalami peningkatan sebesar 0.18%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program** Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran kinerja program menurunkan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi dan meningkatkan luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan

sistem irigasi primer mempunyai Indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air dan formula perhitungan indikator ini adalah realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $\{((\text{Persentase Pembangunan Seawall dan bangunan}) + (\text{Persentase Pembangunan Tanggul Sungai}) + (\text{Persentase Pembangunan Polder/Kolam Retensi}) + (\text{Persentase Pembangunan Embung atau Penampung Air lainnya}) + (\text{Persentase pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi}))/5\}$ . Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(0.78\%+7.39\%+100+100+67.87\%)/5 = 55.21\%$  dari target sebesar 57.34 % atau dengan persentase capaian sebesar 96.28 %. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih besar dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 37.74 %.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Dukungan Regulasi dan Anggaran: Adanya komitmen penganggaran dalam APBD 2025 yang difokuskan pada infrastruktur kerakyatan (irigasi) dan mitigasi bencana;
- Ketersediaan Kolong Pasca-Tambang: Melimpahnya lubang bekas tambang (kolong) yang secara teknis potensial dialihfungsikan menjadi sumber air baku atau embung retensi untuk irigasi;
- Kecukupan Curah Hujan: Wilayah Bangka Belitung memiliki curah hujan tahunan yang tinggi, sehingga potensi pengisian tampungan air (reservoir) sangat besar jika dikelola dengan infrastruktur yang tepat;
- Kesadaran Komunitas Petani: Adanya kelompok P3A (Perhimpunan Petani Pemakai Air) yang masih aktif di beberapa daerah lumbung pangan (seperti di Bangka Selatan), yang siap berkolaborasi dalam pemeliharaan jaringan.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Aspek Teknis & Inovasi: Melakukan pengerukan sedimentasi secara berkala dengan teknologi yang lebih efisien dan memperkuat area pantai kritis dengan perkuatan secara hard structure untuk mencegah abrasi;
  - Optimalisasi Kolong sebagai Long Storage: Mengintegrasikan kolong-kolong besar ke dalam sistem irigasi provinsi sebagai cadangan air saat musim kemarau;
  - Penerapan Smart Water Management: Mulai mengadopsi sensor ketinggian air berbasis IoT (Internet of Things) untuk sistem pengaturan debit irigasi yang lebih efisien;
  - Penguatan Pengawasan Berbasis Masyarakat: Melibatkan P3A dan masyarakat sekitar dalam pengawasan proyek agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan memiliki rasa memiliki yang tinggi;
  - Sinkronisasi Lintas Sektor: Memperkuat peran Dewan SDA Provinsi untuk menekan aktivitas tambang di hulu yang merusak infrastruktur irigasi di hilir;
  - Skema Dana Alokasi Khusus (DAK) & Inpres Irigasi No. 2 Tahun 2025 (SIPURI): Proaktif menjemput bola pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk proyek-proyek skala besar yang tidak tertampung oleh APBD Provinsi
2. **Program** Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran kinerja program meningkatnya persentase kemantapan jalan mempunyai Indikator kinerja persentase kemantapan jalan dan formula perhitungan indikator ini adalah Panjang jalan provinsi kondisi mantap (km) dibagi total panjang jalan provinsi

(km) dikali 100%. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(798,53/859,47) \times 100\% = 92,91\%$  dari target 91,89 % atau dengan persentase capaian sebesar 100 %. Persentase. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 93.04 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Semua Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Jalan terlaksa,
- Terlaksananya Sub Kegiatan Rehabilitasi jalan dan Pemeliharaan Berkala dengan realisasi fisik 100% sesuai dengan Anggaran.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Pengurangan Pagu belanja modal/pemeliharaan Rutin Jalan yang mengakibatkan pemeliharaan kondisi jalan tidak optimal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Diperlukan anggaran penyelenggaraan jalan sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan yang belum mantap, dan pemeliharaan rutin jalan untuk menjaga fungsional kondisi jalan mantap.

- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum mempunyai Indikator kinerja Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Persentase penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi. Formula perhitungan Indikator Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah Jumlah dokumen perencanaan dibagi

Jumlah Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum x 100% realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(1/4) \times 100\% = 25\%$  dari target 25 % atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Formula perhitungan Indikator Persentase penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi adalah jumlah peserta Pembinaan Teknis SDM dan kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi/target peserta Pembinaan Teknis SDM dan kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $40/16877 \times 100\% = 0,237\%$  dari target 0,237 % atau dengan persentase capaian sebesar 100 %. Dan persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 33.33 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedia dalam Renstra dan RPJMD,
- Salah satu indikator capaian SPM Pelayanan Dasar,
- Adanya surat edaran dari Kemendagri, Kemenpu, dan Bappenas untuk mewajibkan pelaksanaan kegiatan;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terbatasnya anggaran,
- Belum menjadi prioritas dalam alokasi anggaran,
- Masih belum meratanya ketercapaian dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengusulkan rencana aksi untuk tahun selanjutnya dalam penyusunan anggaran,

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan.

4. **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan** sasaran kinerja program terselenggaranya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional mempunyai Indikator kinerja Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dibagi Jumlah Keseluruhan Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan x 100%). Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(40/13333) \times 100\% = 0,3\%$  dari target 0,3% atau dengan persentase capaian sebesar 100 %. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedia dalam Renstra dan RPJMD,
- Terdapat dukungan dari OPD lain.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Anggaran minim,
- Belum adanya kepastian rencana lokasi untuk TPST Regional.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Berkoordinasi dengan OPD lain dalam menetapkan rencana aksi persampahan regional.

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam menyiapkan rencana aksi penataan pengelolaan persampahan.

5. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mempunyai Indikator kinerja persentase rumah tangga yang bersanitasi dan Persentase Readness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan. Formula perhitungan indikator persentase rumah tangga yang bersanitasi adalah jumlah rumah tangga yang bersanitasi dibagi jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses sanitasi dikali 100%. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $17369/310160 \times 100\% = 5,6\%$  dari target 5,6% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 28,57%. Formula perhitungan indikator Persentase Readness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan adalah Jumlah dokumen perencanaan dibagi Jumlah Readness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan x 100%). Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(2/8) \times 100\% = 25\%$  dari target 27% atau dengan persentase capaian sebesar 92%. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya surat edaran dari Kemendagri, Kemenpu, dan Bappenas untuk mewajibkan pelaksanaan kegiatan;
- Salah satu indikator capaian SPM Pelayanan Dasar,,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terbatasnya anggaran,
- Belum menjadi prioritas dalam alokasi anggaran,
- Masih belum meratanya ketercapaian dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengusulkan rencana aksi untuk tahun selanjutnya dalam penyusunan anggaran,
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan mendorong prioritas penanganan sanitasi di masyarakat.

6. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** dengan sasaran program meningkatkan tenaga ahli yang terlatih, meningkatkan tingkat kepuasan layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi dan tersedianya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai Indikator rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi formula perhitungan indikator ini adalah  $A (\text{Tenaga Ahli} \times 70\%) + B (\text{Sipjaki} \times 30\%)$ . Capaian indikator kinerja adalah  $A (11,15\%) + B (18,00\%) = 29,14\%$  dari target sebesar 52.79%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 36.56%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Komitmen dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui peningkatan kompetensi Tenaga Ahli konstruksi dan meningkatkan layanan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi ,,

- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Responsif dalam layanan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kondisi keuangan daerah pada tahun 2025 yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk bidang konstruksi membuat sangat minimnya pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Tenaga Ahli yang sudah tersedia selama ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang konstruksi sangat sedikit sekali. Ini membuat banyak tenaga kerja konstruksi yang masih belum memiliki sertifikat ahli menjadi enggan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja,
- Sertifikat Tenaga Ahli memiliki jangka waktu untuk tetap aktif dan dapat tidak berlaku lagi (expired) sehingga Tenaga Ahli yang sudah pernah memiliki Sertifikat Ahli sebelumnya mungkin akan membutuhkan Sertifikasi Tenaga Ahli lagi dikemudian hari agar tetap dapat bekerja di bidang konstruksi sesuai dengan keahliannya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengoptimalkan layanan penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian Pekerjaan Umum.,
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan Stakeholder Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya penataan bangunan gedung mempunyai indikator kinerja persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara dan jumlah perencanaan bangunan. Formula perhitungan indikator jumlah perencanaan bangunan adalah (Jumlah perencanaan bangunan gedung/jumlah bangunan yang direncanakan) x 100%). Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah ( 2 / 2 ) bangunan gedung negara X 100 % = 100% dari target 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100 %. Sedangkan Formula perhitungan indikator persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara adalah jumlah bangunan yang dibangun / jumlah bangunan yang direncanakan. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 0/0x100%=0%. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 100 % untuk indikator persentase jumlah perencanaan bangunan. Sedangkan Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 untuk indikator persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara sebesar 0%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Tersedianya anggaran,
- Ketersediaan tenaga teknis atau pengawas yang kompeten dalam mengawal proses penataan dari tahap perencanaan hingga selesai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih belum tersosialisasinya peraturan dokumen peraturan penataan dan pembangunan gedung negara secara menyeluruh di Kabupaten/Kota.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota

dalam penyusunan dokumen perencanaan dan mendorong prioritas bangunan gedung negara di masyarakat.

8. **Program Kawasan Permukiman** dengan sasaran program meningkatnya kualitas Kawasan permukiman mempunyai Indikator persentase luas Kawasan kumuh yang tertangani formula perhitungan indikator ini adalah Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(2.28 \text{ Ha}/68.83 \text{ Ha}) \times 100\% = 3.3\%$  dari target sebesar 3.3%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 0.32 % (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Tersedianya anggaran
- Adanya pembaharuan SK Kumuh dari Kabupaten/Kota

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Rasionalisasi anggaran
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Dijadikan prioritas anggaran
- Pendetailan perencanaan

9. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** dengan sasaran kinerja program meningkatnya bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata mempunyai indikator kinerja persentase luas kawasan yang tertata Formula perhitungan indikator ini adalah  $(\text{luas kawasan yg tertata}/\text{luas kawasan tertata yang direncanakan}) \times 100\%$ . Realisasi kinerja

untuk indikator ini adalah  $(0,6/0,6) \times 100\% = 100\%$  dari target 100 % atau dengan persentase capaian sebesar 100 %. Persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0 %.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Kesesuaian antara perencanaan teknis (DED) dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga target luas kawasan seluas 0,6 Ha dapat terealisasi sepenuhnya.
- Adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pengelola kawasan cagar budaya/pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat proses penataan
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Masih belum tersosialisasinya peraturan dokumen peraturan penataan bangunan dan lingkungan secara meluruh di Kabupaten/Kota.
- Adanya tantangan dalam proses pembersihan atau penyiapan lahan pada kawasan padat (seperti kawasan cagar budaya) yang memerlukan ketelitian ekstra agar tidak merusak struktur asli.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Memperkuat basis data luas kawasan strategis secara digital untuk mempermudah pemetaan dan penghitungan formula (realisasi/perencanaan) secara lebih akurat.
- Memperkuat basis data luas kawasan strategis secara digital untuk mempermudah pemetaan dan penghitungan formula (realisasi/perencanaan) secara lebih akurat.

10. **Program Pengembangan Permukiman** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya pengembangan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi mempunyai Indikator kinerja Jumlah kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi yang dikembangkan formula perhitungan indikator ini adalah (jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur / jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur yang direncanakan) x 100 %. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(0/0) \times 100\% = 0\%$  dari target 0. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini SAMA \*) dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0 %.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Belum ditetapkannya Peraturan Daerah RTRW Provinsi sehubungan dengan penentuan lokasi kawasan strategis Provinsi.
- Belum validnya data by name by address dari pemerintah kabupaten/ kota yang termasuk daftar tunggu.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melakukan koordinasi intensif dan asistensi dengan legislatif serta instansi vertikal terkait untuk mempercepat proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi sebagai landasan hukum penentuan lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
- Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis (Rakortek) secara berkala khusus untuk memverifikasi daftar tunggu (waiting list) bantuan infrastruktur agar data yang masuk ke Provinsi siap dieksekusi.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	<p>Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum</p> <p><math>((\text{Persentase kemantapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}/14) + (\text{Rasio Jaringan Irigasi}/14) + (\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi}/14) + (\text{Persentase</math></p>	-	-	-	29.41%	29.47%	100%

rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14)						
<p>Realisasi=</p> $(92.91/14)+(33.24/14)$ $+(34.17/14)+(100/14)+$ $(3.30/14)+(43.75/14)+($ $0/14)+(0.78/14)+(7.39/$ $14)+(0/14)+(0/14)+(68.$ $87/14)+(29.14/14)+(0/$ $14)= 29.47\%$						

### 3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Sumber Daya Air

- Program Sumber Daya Air melekat pada Bidang Sumber Daya Air kegiatan sebagai berikut, yaitu :
  - a. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 18.170.459.988,00.
  - b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 13.890.632.529

**Gambar III.1**  
**Program Sumber Daya Air**  
 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Tanggul Sungai Buning
2.		Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan D.I Kimak Kab.Bangka

3.		<p>Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Jeruk</p>
----	---	---

**3.1.1.2. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Penyelenggaraan Jalan**


Program **Penyelenggaraan Jalan** melekat pada Bidang Bina Marga dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 71.082.699.768,25.

Gambar III.2

Program Penyelenggaraan Jalan  
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p><b>Pemeliharaan Berkala Jalan (Ibul – Parit Tiga; Parit Tiga – Tanjung Ru)</b></p>

2.	 <p style="text-align: center;"><b>0%</b>                      <b>50%</b>                      <b>100%</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Penanganan Rutin Kondisi Jalan Provinsi di Kota Pangkalpinang</b></p>
----	---	---

**3.1.1.3. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**  
Program Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan anggaran sebesar Rp Rp23.992.600,00.

Gambar III.3

Program Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan  
Persampahan Regional

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan  
Regional

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		Pembinaan Persampahan
----	---	--------------------------

#### 3.1.1.4. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dengan anggaran sebesar Rp 7.942.817.160,00.

Gambar III.4

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.	<p style="text-align: center;">DOKUMENTASI PROGRES PEKERJAAN (KONDISI 0-25-50-75-100%)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">0%</td> <td style="width: 33%;">25%</td> <td style="width: 33%;">50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0%	25%	50%				75%	100%					<p style="text-align: center;">PENYEDIAAN PRASARANA JAMBAN SEHAT UNTUK PEMICUAN PHBS, PERCEPATAN ODF, DAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING BANGKA TENGAH</p>
0%	25%	50%												
														
75%	100%													
														
2.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 60%;"> <p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>NUDI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 1 No. Iap: 13</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>USMADI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 2 No. Iap: 21</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>AZIS</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 3 No. Iap: 17</p> </td> </tr> </table>		<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>NUDI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 1 No. Iap: 13</p>		<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>USMADI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 2 No. Iap: 21</p>		<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>AZIS</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 3 No. Iap: 17</p>	<p style="text-align: center;">PENYEDIAAN PRASARANA JAMBAN SEHAT UNTUK PEMICUAN PHBS, PERCEPATAN ODF, DAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING BELITUNG TIMUR</p>						
	<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>NUDI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 1 No. Iap: 13</p>													
	<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>USMADI</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 2 No. Iap: 21</p>													
	<p>ITEM PEMBAYARAN: Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik, Sumur Resapan Kloset Leher Ansa dan Bilik</p> <p>URAIAN Atas Nama : <b>AZIS</b></p> <p>LOKASI: JURU SEBERANG BELITUNG</p> <p>KETERANGAN: Setelah Pelaksanaan 100% No. SK: 3 No. Iap: 17</p>													

3.		Pembinaan pengelolaan limbah
----	---	------------------------------

**3.1.1.5. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Penataan Bangunan Gedung**

Program **Penataan Bangunan Gedung** melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi dengan anggaran sebesar Rp 110.378.300.

Gambar III.5

Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan Penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		Pelaksanaan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada
2.		Penyelenggara Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Umum

### 3.1.1.6. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Kawasan Permukiman

Program **Kawasan Permukiman** melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:



- a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan anggaran sebesar Rp Rp326.399.089,00.
- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan anggaran sebesar Rp 4.649.266.365,00

Gambar III.6

Program **Kawasan Permukiman**

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Jalan Lingkungan Peningkatan kualitas kawasan : RTLH
2.		

3.	 <p>9 Nov 2025 09:30:27 Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh</p>
4.	 <p>9 Nov 2025 09:38:01 Jalan Manggar - Gantung Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung</p>	

### 3.1.1.7. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program **Penataan Bangunan dan Lingkungannya** melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- c. Kegiatan Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp 59.090.000.

Gambar III.7

Program **Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota,

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pemeliharaan RTH
2.		

**3.1.1.8. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program **Pengembangan Jasa Konstruksi** melekat pada Bidang Jasa Konstruksi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp 204.704.900,00.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi sebesar Rp 85.618.750,00.

Gambar III.8

**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

2.		<p>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli</p>
----	---	---

**3.1.1.9. Data Dukung Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**  
 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melekat pada Bidang CiptaKarya Perumahan dan Permukiman dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dengan anggaran sebesar Rp 123.559.600.

Gambar III.9

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>PEMBINAAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN</p>

2.		PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
3.		

### 3.2.1. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4

1.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$IK = \frac{IP+E}{2}$
----	---	---------------------------------------	-----------------------

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan (indeks Perencanaan , Pemanfaatan dan Kepatuhan Penataan Ruang + pengawasan)/2.

Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 0.7% atau sebesar 100% dari target 0.7%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja DPUPRPRKP pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	IndikatorSasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.65	0.65	100	0.7	0.7	100	0.8	87.5

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan

Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 0,7 , dengan demikian capaian kinerja mencapai 100% (tercapai).
- b. Dibandingkan tahun lalu capaian kinerja sebesar 0.65, mengalami peningkatan capaian kinerja terhadap tahun lalu sebesar 0,05.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran tercapai 87,5 %.

Keberhasilan peningkatan capaian indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya kegiatan penataan ruang dengan indikator Indeks Perencanaan, Pemanfaatan dan Kepatuhan Penataan Ruang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IP) ditambah Hasil Pengawasan Teknis (E) dibagi 2. Nilai E merupakan hasil pengawasan Teknis tahun 2025. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah

$$IP = \frac{\left( \frac{\text{Struktur ruang termanfaatkan}}{\text{Rencana struktur ruang}} \right) + \left( \frac{\text{Pola ruang termanfaatkan}}{\text{Rencana pola ruang}} \right)}{2}$$

$$IP = \frac{0,75 + 0,7}{2}$$

$$IP = \frac{1,45}{2} = 0,725$$

IP = 72,5 %

$$IK = \frac{0,725 + 0,678}{2} = 0,7015 \approx 0,70 \text{ (70\%)}$$

Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0.65 atau 65 % (presentase capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terbitnya Persetujuan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri ATR/BPN;
- b. Forum Penataan Ruang Provinsi yang aktif dan berkontribusi dalam koordinasi lintas sektor.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum keluarnya hasil evaluasi pembahasan Ranperda RTRWP di Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak dapat digunakan untuk proses rekomendasi tata ruang;
- b. Belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Kewenangan Gubernur dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak diakomodir dalam sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA)
- d. Keterbatasan Anggaran untuk pengadaan sistem informasi geografis (GIS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mendorong koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian kendala dalam legalisasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Percepatan legalisasi perda RTRW Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. **Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya Kegiatan Pertanahan mempunyai Indikator kinerja persentase program pengadaan tanah untuk kepentingan umum formula perhitungan indikator ini adalah  $(\text{Realisasi Tahapan Koordinasi} / \text{Target Tahapan}) \times 100\%$  . Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(3/10) \times 100\% = 30\%$  dari target 40 % atau dengan persentase capaian sebesar 75%. persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dengan Tahun 2024 yang sebesar 30%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan pemerintah yaitu komitmen pemerintah pusat/daerah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan akan mempercepat proses pengadaan tanah.
- b. Sinkronisasi permasalahan data pertanahan.
- c. Sinkronisasi program dan pengalokasian anggaran.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam permasalahan pertanahan;
- b. Belum tersinkronisasinya data pertanahan yang akurat dan

mutakhir;

- c. Belum tersinkronisasinya program dan anggaran.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengusulkan program agar sesuai dengan kegiatan maupun sub kegiatan serta anggaran.
- b. Penelusuran data pertanahan yang akurat dan mutakhir.

3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan sasaran kinerja program terselenggaranya Kegiatan Penatagunaan tanah mempunyai Indikator kinerja jumlah dokumen penatagunaan tanah. Formula perhitungan indikator ini adalah dokumen yang disusun/ dokumen penatagunaan tanah yang direncanakan. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah  $(1/1) = 1$  dari target 1 dokumen atau dengan persentase capaian sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya data penggunaan tanah.
- b. Sinkronisasi program dan anggaran.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum sinkronnya data penggunaan tanah.
- b. Belum tersinkronisasinya program dan anggaran.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penelusuran data penggunaan tanah yang mutakhir.
- b. Mengusulkan program agar sesuai dengan kegiatan maupun sub kegiatan serta anggaran.

Tabel III.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	<p>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p><math>IK = (IP + E) / 2</math></p> <p>Realisasi = <math>(0.725 + 0.678) / 2 = 0,7</math></p>	-	-	-%	0.7	0.7	100%



### 3.2.1.1 Data Dukung Capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melekat pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 47.533.200
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp 89.071.500
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 26.750.000
- d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 188.822.900

**Gambar III.1**  
**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**  
 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		
2.		<p style="text-align: center;">Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan , Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang</p>



3.		
4.		

### 3.2.1.2 Data Dukung Capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum melekat pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp36.249.700,00.

**Gambar III.2**  
**Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum**  
**Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah.**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Pengukuran Tanah</p>
2.		

### 3.2.1.3 Data Dukung Capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah melekat pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp33.485.900,00.

Gambar III.3  
Program Penatagunaan Tanah  
Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas  
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Penatagunaan Tanah

2.



### *Efisiensi Anggaran*

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	29.41%	29.47%	100%	136,400,725,171.50	126,794,649,730.00	92.95	9,606,075,441.50
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.7	0.7	100%	352.177.600,00	231.684.414,00	65.78	120.493.186,00
<b>Total Belanja</b>						136,752,902,771.50	127,026,334,144.00	92.88	<b>9,726,568,627.50</b>

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 136,752,902,771.50, terealisasi Rp 127,026,334,144.00 atau 92.88% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 9,726,568,627.50 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi.
- Efisiensi Belanja Modal.
- Efisiensi Belanja Tak Terduga (cth.)

#### *Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025*

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : ..... perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/OUTPUT	PELAKSANAAN				LINK BUKTI DUKUNG
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1										
2										
dst										

Mengetahui,  
Kepala Dinas PUPRPRKP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

JANTANI ALI, ST  
NIP.19731022 200501 1 007

### *Inovasi*

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SIPALINGPKP untuk mendata rumah, jalan lingkungan dan sanitasi.
- c. Aplikasi SIPENASAKTI untuk memastikan perencanaan dan evaluasi program berbasis kebutuhan riil masyarakat dan skala prioritas wilayah.

### *Penghargaan*

*Sepanjang Tahun 2025 DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :*

### *Crosscutting*

*Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan PD... Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya*

# CROSS CUTTING

## DPUPRPRKP PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG

### Pemerintah Provinsi

- **Kementerian PUPR (BPJN & BWS):**
- Kodadioni sinkronisasi status jaatus jalan provinsi serta mnegslagan sumbera daya air dan pangansnan pantal.
- **Kementerian ATR/BN**
- Kodadioni aksesibilitiat jalan merresjui simpul (Pelatv) Peladuras) itrada & Bandittra) serta sekeslatat jalan

### Bappeda

- Kodradioni perannanran makro, integralt program prioitas dalam RKPD, an keneadilian pendnanan.

### DLH & DKP

- Kodradioni penyusunan dokumen linblunntan (AMDAL) ant tata ruang urfah laut (RZWP5K)

### Dinas Pariasstta

- Kodradioni bebabugian infarsturktur pada Kawasan Strategis Strategis Pasiatata National (KSPN)

### Pemerintah Pusat

### Kementerian ATR/BN:

- Kodadioni snitrsiakaiKcererara Tta jaru tranohg Tala Ruang Viilliyah (RTRW) Provinsi uidn target bamtzugian nasional.

### Kementerian Perkim

- Kodadioni bantun stimulan prumsahan swadadya an engabtar kausaa permukiman strategis

### PT PLN & Telkom

- Kodadioni relokasi atau utilitas (kabel/tiag) pa memaslian pensgitem panti jalan aan lalu linttas satat rada pembalugan

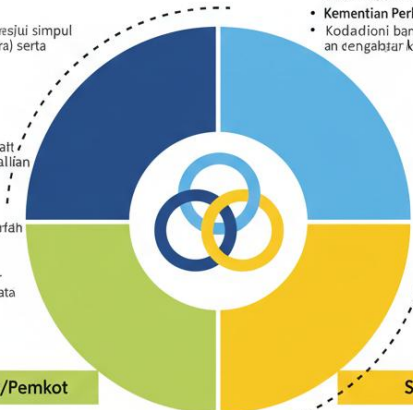
### Lintas OPD Pemkab/Pemkot

- **DPU Kabusten/Kota**
- Kodadoni Kab/Kota
- Kodadioni pembabugian kewanangan penaangan jalan and drainase agar ntak tetraik teradi tumpang hektar) and sanitasi
- **Dinkes & Dinsos**
- Kodadoni penyadian balitam aseir kus esinrum dan sanitasi dnrhptn scabn seltiinasi layak sebagn upupai apupai interveiei irtelein :tetnuran angka stuntah stunting

### Staketholder Lainnya

### PT PLV or Swasta/CSR

- Kodadioni relokasi atau utilitas) pala ruang milik jalan sata saat da bebubugan)
- Kodadioni kerelibatan dunia ustah dalam pememahian infarsturta di (Dfrlu jalu logistik atau wialijal mereki



# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Ketersediaan Infrastruktur tercapai dengan presentase 100% serta untuk indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang tercapai dengan presentase 100%.
2. Keberhasilan tercapainya kinerja tersebut tidak lepas dari tersedianya data teknis infrastruktur yang akurat dan terintegrasi berbasis spasial (GIS) sebagai bahan penentuan sasaran program dan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi teknis (RTRW, RDTR, RISPAM, dokumen perencanaan jalan dan irigasi) terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, serta kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
3. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku pembangunan sangat besar dalam mendukung program dan kegiatan DPUPRPRKP

dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan ruang yang berkelanjutan serta pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan berwawasan lingkungan

#### **4.2 Rekomendasi**

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
2. Memaksimalkan implementasi Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
3. Memaksimalkan peran bidang penataan ruang dan pengawasan bangunan dalam upaya mengatasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan tanpa izin melalui sosialisasi regulasi, pengawasan terpadu, dan penegakan aturan secara konsisten. Di samping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lembaga pertanahan, lingkungan hidup, perizinan, serta aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap permasalahan

pemanfaatan ruang yang sedang terjadi sehingga solusi pemecahan masalahnya bisa segera diatasi.

4. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui berbagai media seperti diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
5. Publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
6. Memaksimalkan peran bidang perumahan dan kawasan permukiman serta instansi pemerintah terkait dengan melibatkan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), sanitasi, dan penyediaan air minum.
7. Perlunya payung hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan perumahan layak huni, sehingga ada kejelasan aturan dalam pemberian pelayanan, perlindungan maupun mekanisme bantuan dan subsidi perumahan.
8. Memberikan penanaman nilai-nilai tertib tata ruang, kepedulian lingkungan, dan budaya keselamatan konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

9. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kapasitas manajerial berbasis kinerja.

#### **4.3 Rencana Aksi**

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD terkait dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur serta penataan ruang.
4. Implementasi hasil kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal secara lebih intensif antar bidang di lingkungan DPUPRPRKP guna memastikan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
6. Mengembangkan sistem informasi infrastruktur dan penataan

ruang berbasis digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja.

7. Meningkatkan pengawasan lapangan secara berkala terhadap pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang.
8. Melakukan sosialisasi regulasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait pentingnya penataan ruang dan pemeliharaan infrastruktur.



# LAMPIRAN



Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	persentase ketersediaan infrastruktur	18.93	32.39	41.80	54.01
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.6	0.65	0.7	0.75







Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2025

DAFTAR KEGIATAN/REKAM JEKAS DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHKAMAN										
No	Tahun	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
1	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
2	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
3	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
4	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
5	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
6	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
7	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
8	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
9	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
10	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
11	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
12	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
13	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
14	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
15	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
16	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
17	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
18	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
19	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah
20	2025	Daerah	Sub-Region	Unit Kerja	Uraian Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe	Daerah



Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah.....

*Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025*

*Scan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025*



